

KORUPSI DAN KECERDASAN

Oleh
Yoseph Andreas Gual

Salah satu masalah sosial yang menjadi akar masalah lain pada bangsa ini adalah korupsi. Betapa tidak, pengalaman keseharian mengatakan bahwa sentuhan korupsi sudah kita alami mulai dari aktivitas sederhana seperti pengurusan dokumen di lembaga pemerintahan. Berdasarkan laporan *Transparency International*, indeks persepsi korupsi tahun 2014 menempatkan Indonesia berada pada urutan rendah yaitu 34 yakni 107 dari 175 negara di dunia berada di bawah Malaysia, 50/175. *Indonesia Corruption Watch* merilis data semester pertama tahun 2014 menunjukkan negara mengalami kerugian sebesar 3,7 triliun rupiah akibat korupsi oleh pejabat mulai dari pusat sampai daerah dari 308 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. 97 kasus korupsi terjadi di daerah. Sebelumnya, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P@EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan data mereka bahwa negara mengalami kerugian sebesar 153,1 triliun dalam rentang waktu 2001-2012.

Penjaga utama dan palang pintu terakhir keadilan bangsa ini yang diharapkan bersih dan sungguh-sungguh memberantas korupsi ternyata malah terlibat dalam praktek suap menyuap untuk meloloskan para koruptor.

Menyakitkan memang melihat situasi bangsa semacam ini. Di satu sisi, ada separuh anak bangsa yang menderita kekurangan makanan, ketiadaan pekerjaan, kekurangan gizi, mengais makanan di tempat sampah, ketiadaan tempat tinggal dan pemenuhan kesehatan-pendidikan dasar berubah menjadi kebutuhan lux sementara di sisi lain, sekelompok kecil anak bangsa dengan kemampuannya menguras kekayaan bangsa untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Bangsa ini penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Di depan publik, orang berkedok sebagai figur jujur dan aktivis keadilan yang bersih namun di belakang ia bersekongkol dengan para koruptor untuk menutupi jejak kesalahan yang terjadi. Bagi publik dijanjikan hal-hal mengagumkan dalam penuntasan korupsi namun di dalam kamar-kamar hotel terjadi transaksi jutaan rupiah untuk meloloskan para koruptor. Masyarakat diajak untuk memberantas korupsi secara bersama-sama tetapi topik pembicaraan pada SMS dan layanan panggilan *hand phone* tentang bagaimana, kapan dan di mana “transaksi hukum” terjadi. Hampir semua perkataan di depan dan untuk publik tidak bisa dipengang. Kata-kata tidak pernah mampu diejawantahkan dalam perilaku. Seperti yang dikemukakan Roland Barthes, kata-kata multimakna (polisemi). Pemberantasan korupsi bisa ya bisa tidak.

Perilaku Binatang

Plato mengungkapkan bahwa manusia terdiri dari tiga unsur yakni nafsu, semangat dan rasio. Manusia akan menjadi baik apabila ketiga unsur ini bekerja secara seimbang dalam dirinya. Bila salah satu unsur lebih mendominasi unsur yang lain maka manusia akan berperilaku buruk. Agar manusia menjadi seimbang kembali, rasio harus difungsikan. Dengan kata lain rasio menjadi pengendali dua unsur yang lain.

Perilaku koruptif yang merajalela dalam kehidupan keseharian sekarang ini sebenarnya merupakan sebetulnya ketidakseimbangan yang dipraktikkan manusia atas ketiga unsur tersebut. Orang cenderung mengikuti nafsu-nafsu serakah mereka. Manusia terlampaui bersemangat untuk mengambil tanpa berpikir untuk terlebih dahulu memberi. Orang terbiasa mengikuti nafsu serakahnya untuk mengambil apa (mengambil terlalu banyak) yang bukan menjadi haknya sembari melupakan kewajiban. Mereka tidak berpikir dampak negatif yang bakal terjadi bagi diri sendiri dan masyarakat umum ketika mereka berperilaku mengikuti dorongan nafsu.

Thomas Hobbes mengemukakan, walaupun manusia mampu menciptakan budaya dan peradaban yang mengagumkan namun di dalam diri manusia terdapat kecenderungan kebinatangan. Karakter kebinatangan itu, Hobbes sebut sebagai *leviathan*: karakter iblis yang ada dalam tubuh manusia. Dorongan itu sebenarnya mengarah pada individualisme ekstrim di mana manusia dapat berperilaku irasional dan destruktif. Manusia berubah menjadi serigala bagi manusia yang lain, *homo homini lupus*. Manusia menjadi *leviathan*: menjadi iblis bagi manusia lain.

Perilaku koruptif, tamak, serakah, egois, jahat kepada masyarakat yang kita saksikan saat ini sebenarnya dalam kerangka pemikiran Hobbes adalah perwujudan dari perilaku *leviathan/lupus* yang irasional dan destruktif itu. Menurut Hobbes perilaku jahat/kebinatangan bukan tidak bisa dikendalikan. Perilaku tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan rasio manusia. Budaya *leviathan/lupus* harus dikungkung dengan budaya rasionalitas. Orang harus berani menggunakan rasio untuk mengevaluasi tindakannya.

Sekali lagi rasio manusia menjadi jalan keluar terbaik yang dianjurkan Plato dan Hobbes untuk mengendalikan perilaku buruk manusia. Namun anehnya dalam realitas keseharian yang kita saksikan, ternyata yang melakukan tindakan koruptif adalah mereka-mereka yang dianggap memiliki rasio baik. Mereka adalah orang-orang terpelajar dengan jenjang pendidikan terbaik. Mereka memiliki kemampuan rasio di atas rata-rata orang kebanyakan. Jabatan yang mereka emban adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang terpilih secara rasio. Mereka pintar dan cerdas secara intelektual. Namun kecerdasan mereka tidak menjamin bahwa mereka tidak korupsi. Rasio mereka tidak menghalangi mereka untuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, mereka mempergunakan kecerdasan mereka untuk berspekulasi, berkonspirasi, tidak jujur, dan mencari kesempatan untuk korupsi. Entah pada waktu melakukan tindakan korupsi mereka memikirkan tindakan tersebut destruktif-

irasional atau tidak. Mereka menjadi orang-orang pintar yang penuh dengan kebusukan dan muslihat.

Rasio Saja Tidak Cukup

Dari kenyataan ini, dapat kita katakan pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi tidak bisa hanya mengandalkan rasio semata. Kita memang membutuhkan orang yang memiliki kecerdasan intelektual dalam menilai, menganalisis, menimbang dan memutuskan berbagai masalah yang dihadapi. Kita memang membutuhkan orang-orang yang cerdas secara intelektual untuk menjadi pemimpin. Namun bila hanya mengandalkan kecerdasan rasio semata maka praktek korupsi tidak akan bisa hilang. Yang muncul malah semakin banyak *leviathan-leviathan* dan *lupus-lupus* yang lebih pandai berkorupsi dan berkelit dari hukum.

Kita membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan pikiran. Kita membutuhkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Kita membutuhkan pemimpin dan pejabat publik yang memiliki keempat kecerdasan ini secara seimbang. Kita membutuhkan pemimpin dan pejabat publik yang mampu berpikir jernih dan memiliki visi ke depan. Pemimpin yang peka terhadap kesulitan dan pro terhadap rakyatnya terutama yang kecil dan menderita. Kita membutuhkan pemimpin dan pejabat publik yang melihat jabatan mereka sebagai amanah untuk melayani mereka yang dipimpin terutama yang kecil dan melarat. Kita membutuhkan pemimpin publik yang melihat kekuasaan sebagai sarana untuk mengupayakan transformasi hidup yakni pembebasan dari semua masalah sosial. Kita membutuhkan pemimpin dan pejabat publik yang dapat turun ke bawah bukan untuk mencari muka tetapi turut merasakan (empati) derita rakyatnya sekaligus juga mampu bernegosiasi dengan pejabat dan pemimpin lain untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Kita berharap para pemimpin dan pejabat publik untuk melengkapi diri mereka dengan pedang dan perisai kecerdasan-kecerdasan ini. Kita berharap mereka dan kita semua mau belajar memperkaya diri dengan keempat kecerdasan ini. Kita berharap dengan empat kecerdasan ini, semua pemimpin dan pejabat publik menjadi aktor utama pemberantasan korupsi.

Ke depan, bila kita menginginkan negara ini sembuh dari kanker korupsi maka mulai sekarang generasi muda sudah harus dididik dengan pola pendidikan yang mengarah pada pencerdasan keempat kepintaran tersebut. Di mulai dari keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan terutama, anak mesti dididik untuk menghormati dan melaksanakan kebenaran serta kejujuran. Anak dididik untuk terlebih dahulu memberi dari pada mengambil. Anak dididik untuk melunasi kewajiban dari pada menuntut hak. Anak dididik untuk wajib memberikan hak orang lain sebagai haknya.

Sekolah tidak saja berfungsi sebagai tempat pentransferan ilmu semata tetapi sekaligus juga berperan aktif membentuk karakter kepribadian anak didik.

Penegakan disiplin dan prosedur pendidikan, menyediakan dan mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang melatih dan meningkatkan ketiga kecerdasan lain juga perlu mendapat porsi yang sebanding.

Lembaga-lembaga sosial lain dalam masyarakat pun seharusnya turut serta dengan cara dan kemampuannya masing-masing menyediakan kesempatan-kesempatan pendidikan pencerdasan keempat kepintaran tersebut. Namun cara terbaik mendidik generasi muda untuk meraih keempat kecerdasan itu tidak lain yakni dengan keteladanan. Keteladanan untuk tidak korupsi dalam bentuk apapun.